

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Afriyanah. 2015. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Studi empiris pada Kecamatan-Kecamatan di Kota Tangerang periode 2010 s/d 2013*. *Ultima Accounting* Vol 7. No.1. Juni 2015.
- Anwari, Ma'sum. 2013. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Boyolali*.
- Astuti, Puji. 2009. *Aplikasi Analisis Kovarian (Anakova) Pada Kasus Pengaruh Letak Daerah Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Distribusi Pendapatan Di Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- BPS. *Payakumbuh dalam Angka 2000-2017*. Kota Payakumbuh.
- Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
- Chaizi Nasucha, 1997, " Peranan Informasi Pertanahan Dalam Pengelolaan PBB ", *Jurnal Survei dan Properti* Vol. 009 Oktober.
- Devas, Nick, dik. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.
- Guritno, Mangkoesoebroto, 1994, *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.
- Halim, Abdul, Bawono, Icku Rangga dan Dara, Amin. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* Salemba Empat, Jakarta.
- Insukindro, 1994, *Penerimaan Pajak*, Djambatan, Bandung.
- Kosasi, Juliana. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Menurut Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. Volume 7, Nomor 02, Oktober 2017.
- M. Suparmoko, 1986, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE

UGM, Yogyakarta.

- Nastiti Amana Mutia. 2008. *faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan PBB dan dampaknya terhadap penerimaan daerah.*”Skripsi akuntansi”.
- Polli, Sumena. 2014. *Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado.* Jurnal EMBA ISSN : 2302-1174 Hal 751-761.
- Rahayu, Siti. 2003. *Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Surakarta.* Jurnal Kinerja vol 8 no 2 : 133 -147.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi ke empat. Salemba Empat. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus.* Edisi ke enam. Salemba Empat. Jakarta.
- Rochmat, Soemitro. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan,* Eresco, Bandung.
- Sasana, Hadi. 2005. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Banyumas.*
- Setiawan & Basri Musri. 2006 *perpajakan umum,* Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharyadi dan Purwanto. 2013. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern.* Jakarta.: Penerbit Salemba Empat.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan Teori dan Aplikasi dengan SPSS.* Yogyakarta: Penerbit CV ANDI OFFSET.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makroekonomi,* Edisi ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suprianto Edy. 2011. *Perpajakan di Indonesia,* Edisi 1, GRAHA ILMU. Yogyakarta.
- Thamrin Simanjuntak. 2001, *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Trigiant, dkk. (2014). *Melakukan penelitian dalam bentuk jurnal yang berjudul “Kajian Empiris tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Padang tahun 2009-2012.*

Marihot Pahala Siahaan,2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_.2010. *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_.2011. *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.

Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.

Waluyo.2007. *Perpajakan Indonesia*. Edisi ke enam.Salemba Empat. Jakarta.

\_\_\_\_\_.2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi ke delapan.Salemba Empat. Jakarta.

## **B.Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 5 angka 2.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 12 dan 13 Tahun 2008 tentang Pemekaran wilayah Kota Payakumbuh menjadi 5 kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang Kota Payakumbuh secara administratif terbagi atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai Daerah Tingkat II dengan wilayah Pemerintahan sendiri.

Republik Indonesia. 2014. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Payakumbuh ditetapkan sebagai Kota Kecil.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **C.Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Diakses tanggal 02 Mei 2018.

<http://www.jurnalanalisisfaktor-factoryangmempengaruhipenerimaanpbb2005.//>  
Diakses tanggal 21 April 2018.

<http://www.jurnalfaktor-factoryangmempengaruhipenerimaanpbbkutaibarat> 2010.//  
Diakses tanggal 21 April 2018.

[http://djkd.kemendagri.go.id/produk\\_hukum](http://djkd.kemendagri.go.id/produk_hukum) Diakses tanggal 21 April 2018.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan\\_ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi). Diakses 21 April 2018.

[www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan](http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan), diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 18.09 WIB.

[www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman\\_Umum\\_Pengelolaan\\_PBB\\_P2](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Pedoman_Umum_Pengelolaan_PBB_P2),

diakses pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 18.15 WIB.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2013 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian, dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (<http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/unduh/download/9-per/1112-per-02-pb-2018.pdf.html>).

